

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “Tionghoa” muncul pertama kali sekitar akhir abad ke-19, yang mana istilah “Tionghoa” dianggap “lebih halus dan mengandung konotasi positif” daripada istilah “Cina” (Suryadinata, 2002: 101). Namanya berasal dari lafal Hokkian, “Zhonghua” (yang lama-lama diucapkan menjadi “Tionghoa”) dan berhubungan sangat erat dengan nasionalisme yang sedang menggelora di Indonesia pada akhir abad ke-19 M (Suryadinata, 2002: 101). Sebelumnya, nama “Zhonghua” sudah lama dipergunakan sejak berabad-abad lamanya sebagai padanan kata dari “Zhongguo” (istilah Tiongkok Daratan dalam lafal Hokkian) agar kaum pribumi (penduduk asli Indonesia) dapat membedakan mana orang Tionghoa (peranakan Tiongkok-Indonesia) dan orang Tiongkok asli. Istilah “Zhongguo” berarti “Tiongkok Daratan” (atau “Cina Daratan”), dan istilah ini populer di masa-masa akhir dinasti atau kekaisaran Tiongkok sebelum jatuhnya revolusi berdarah di Tiongkok, akhir abad ke-19 M hingga awal-menengah abad ke-20 M (Suryadinata, 2002: 101).

Perkembangan masyarakat Tionghoa di Indonesia memang tidak lepas dari perjalanan panjang sejarah bangsa ini semenjak dijajah oleh Barat. Ditarik dari awal abad ke-16 M, bangsa Tionghoa mulai mengembangkan diri ke pelbagai macam kemampuan mereka, seperti berdagang (yang sekarang masih

mendominasi di Indonesia), bertani, dan lain-lain (Suryadinata, 2002: 120). Yang masih bertahan hingga kini memang berdagang. Sebab, kemampuan mereka paling *mentok* (Jawa: paling mantap) di bidang perekonomian, bahkan sudah ada sejak masa awal-awal peradaban Tiongkok Daratan (Suryadinata, 2002: 120-121).

Perkembangan demografis masyarakat Tionghoa di Indonesia memang tak begitu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Terakhir, berdasarkan kutipan dari laman portal dalam jaringan (*online*) BBC Indonesia, menyebut, “.....dengan data dari Sensus Penduduk 2010, jelas bahwa populasi etnis Tionghoa jumlahnya jauh lebih kecil dari yang selama ini disangka, yaitu 1,2% dari populasi total Indonesia” (dikutip dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41736620> serta diakses pada 20 September 2018 pukul 15.07 WIB).

Namun, dalam kutipan yang berikutnya, terjadi “koreksi” pernyataan yang menyebut, “.....untuk pertama kalinya sejak 1930, era kolonial Belanda, orang ditanya etnisitas mereka” (dikutip dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41736620> serta diakses pada 20 September 2018 pukul 15.10 WIB). Artinya, perkembangan demografis masyarakat Tionghoa tidaklah “sebesar” yang dikira para pengamat sosial-budaya asal Indonesia maupun internasional, serta berdasarkan pengamatan seorang Indonesianis asal Australia, Charles Coppel, yang menyebut, “....selama 70 tahun tidak ada data yang digunakan untuk mengestimasi seperti apa komposisi perbedaan etnis atau suku bangsa di Indonesia. Ada prediksi etnis Cina di Indonesia jumlahnya 2,5%, 3% atau bahkan 5% dari populasi, namun ternyata

1,2% saja” (dikutip dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41736620> serta diakses pada 20 September 2018 pukul 15.13 WIB).

Perkembangan demografis masyarakat Tionghoa memang tak sebanyak yang dikira oleh para pengamat sosial-budaya asal Indonesia atau luar negeri. Bahkan, Indonesianis asal Amerika Serikat, Benedict R. Anderson (1936-2015), menyebut bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia sedikit banyak terpengaruh oleh budaya Indonesia ketimbang budayanya sendiri (Anderson, 1983: 99-102).

Maka, tak heran andai itu “hanya” terjadi di Indonesia saja, bukan pada diaspora Tiongkok di negara lainnya, seperti Kanada dan Amerika Serikat. Fenomena-fenomena tersebut bukan ditentang, justru dikuatkan oleh penelitian Ariel Heryanto melalui karya fenomenalnya, *Identitas dan Kenikmatan : Politik Budaya Layar Indonesia* (2015), yang menyebut jika Tionghoa di Indonesia berbeda dengan Tiongkok sendiri, meskipun beberapa di antara mereka (Tionghoa – pen) masih mampu fasih berbahasa Mandarin (Heryanto, 2015: 197-199). Bukan karena (selain) fisik, tetapi budaya (dan bahasa) juga sudah berbeda jauh dengan aslinya (Tiongkok Daratan – pen) (Heryanto, 2015: 197-199).

Paham kaum minoritas, khususnya Tionghoa, yang menjadi isu utama dalam skripsi ini memang sudah tak perlu ditanyakan lagi. Kutipan dari laman portal *online* BBC Indonesia menyebutkan, “....dari sisi agama, Coppel melihat bahwa etnis Tionghoa di Indonesia sebagai kelompok etnis yang “cukup pluralis”, karena tersebar di semua kelompok agama” (dikutip dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41736620> serta diakses pada 20

September 2018 pukul 15.16 WIB). Artinya, masyarakat etnis Tionghoa tak hanya memeluk satu agama saja, melainkan bermacam-macam agama, mulai dari Budha, Kristen (Protestan dan Katolik Roma), hingga Islam. Laporan laman portal *online* BBC Indonesia juga melanjutkan, “.....komposisinya, hampir separuhnya menganut Budha, sementara ada 27% Kristen Protestan, dan hampir 17% Katolik. Penganut Muslim dan Konghucu di kelompok etnis Tionghoa kurang lebih sama, yakni sekitar 4%” (dikutip dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41736620> serta diakses pada 20 September 2018 pukul 15.19 WIB).

Kaum minoritas (khususnya Tionghoa) di Indonesia, selain ahli dalam perekonomian, khususnya dalam dunia perdagangan, juga pernah mengalami nasib yang menyakitkan pada awal-awal masa kolonialisme. Ditarik pada abad ke-18 M, ketika *Vereenidge Oost-Indische Compagnie* (VOC) menduduki Indonesia, kaum Tionghoa sudah berada di garda depan membela kaum pribumi.

Peter Carey, spesialis sejarah Indonesia, menulis, “....Perang Suksesi Jawa I (1741-1743). Yang mana lebih dari 10.000 etnis Tionghoa di Batavia (sekarang Jakarta) mengalami “banjir darah” akibat persekongkolannya dengan kaum pribumi untuk melawan VOC, yang menyebabkan meletusnya Perang Suksesi Jawa I (1741-1743) antara Kesultanan Mataram Islam dengan VOC” (Carey, 2017: 67-68). Carey, yang terkenal dengan karya fenomenalnya, *Kuasa Ramalan : Perang Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855* (2012), *Takdir : Riwayat Pangeran Diponegoro* (2014), dan *Inggris di Jawa, 1811-1816* (2016), juga menulis, jika etnis kaum Tionghoa banyak berperan penting di masa-

masa itu, khususnya ketika awal-awal berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (1755-56). Salah satunya ialah seorang perwira Tionghoa yang bernama Tan Jin Sing (1760-1831), yang “berperan” penting di masa awal-awal Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat hingga peristiwa penyerangan Inggris ke Yogyakarta dalam “Geger Spehi” atau “Geger Sepoy” (atau versi Inggris : “The Sepoy Mutiny of Yogyakarta”, 19-20 Juni 1812) (Carey, 2016: 180-199).

Ariel Heryanto, dalam *Identitas dan Kenikmatan : Politik Budaya Layar Indonesia* (2015), menulis diskriminasi rasial terhadap kaum Tionghoa (dan kaum pribumi) di Indonesia baru terjadi pada awal-awal dekade abad ke-20 M. Sebelumnya, pada pertengahan abad ke-19 M, kolonial Belanda mengatur penggolongan kelas sosial berdasarkan Aturan Konstitusional (1854), yang membagi dua jenis warga, antara kaum kulit putih Eropa (termasuk Belanda) dengan penduduk asli, yakni Tionghoa (termasuk para pendatang dari Tiongkok), India, Arab (Timur Tengah), termasuk kaum pribumi, atau yang dikenal dengan istilah *gelijkgestelde* (yang disetarakan) (Heryanto, 2015: 225-226). Penggolongan itu merupakan satu-satunya tindakan diskriminasi rasial yang tak terampuni, bahkan terhadap kaum pribumi (Indonesia). Heryanto lagi-lagi “mengkritisi” tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda yang seolah-olah “meminggirkan” status kaum minoritas, termasuk kaum Tionghoa dan kaum pribumi (Indonesia) (Heryanto, 2015: 225-226).

Tema dalam skripsi ini memang Soe Hok-gie, sosok yang pernah mencuat kurun 1960-an di Indonesia, dan bukan (isu) Tionghoa—meskipun keduanya saling berkelindan. Dia seorang aktivis-demonstran, pendaki gunung—dan mati

muda. Majalah *Tempo* mengangkat sosoknya selama dua kali, yakni edisi 1983 (melalui resensi catatan hariannya yang, amat sangat fenomenal dan, dibukukan dengan judul *Catatan Seorang Demonstran/CSD*, 1983; edisi revisi 2012, Jakarta, LP3ES oleh Daniel Dhakidae, edisi 6-13 Agustus 1983) dan edisi 2016 (edisi khusus yang mengangkat dalam-dalam mengenai sosoknya, edisi 10-16 Oktober 2016). Pemuda kelahiran Jakarta, 17 Desember 1942 itu merupakan sosok yang paling “terkenal dan mencuat” kurun 1960-an dibanding rekan-rekan angkatan 1966 lainnya (termasuk yang masih hidup, atau pula [yang] telah wafat, hingga sekarang, di antaranya Fahmi Idris, Jusuf Kalla, Boediono, Rahmat Witoelar, Aristides dan Cornelis “Joost” Katoppo, Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Cosmas dan Max Batubara, Jusuf dan Sofjan Wanandi, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, Sarlito Wirawan Sarwono, dan lain-lain).

Bagaimana Majalah *Tempo*, yang dengan “berani”, mengangkat sosoknya, meskipun ketika edisi tersebut diterbitkan (2016-sekarang), isu etnisitas tengah “memanas” antara kaum mayoritas (“diwakili” oleh kaum Islamis-populis) dan kaum minoritas (“diwakili” oleh kaum Tionghoa serta kaum Kristiani-populis) hingga kini belum terjawab. Apakah karena keuntungan semata atau hanya karena terjalinnya “persahabatan” antara beberapa pemimpin dan redaktur senior Majalah *Tempo* (antara lain Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri) dengan Hok-gie. Atau, mungkin pula, Majalah *Tempo* mengangkat sosoknya karena “kedekatan” Hok-gie dengan Goenawan Mohamad, pemimpin dan redaktur senior Majalah *Tempo*, yang sama-sama idealis kurun 1960-an.

Soe Hok-gie memang seorang Tionghoa. Ia juga merasa bagian dari warga negara Indonesia. Ia pula yang menentang aksi pembunuhan massal terhadap oknum-oknum yang diduga menjadi bagian dari PKI dan *underbouw*-nya, Oktober 1965 hingga Maret-April 1966. Ia merasa jengah jika dirinya dikaitkan dengan komunisme, dan hal itu ia rasakan sendiri ketika akan menjalani misi pertukaran pelajar-mahasiswa ke Amerika Serikat, September 1968 (Tempo, 2016: 47-59).

Penelitian (atau riset) ini mengutamakan akan sikap anti-rasis terhadap suatu etnis, baik etnis mayoritas maupun etnis minoritas (khususnya di Indonesia). Penting untuk dicatat, bahwa sejarah perkembangan bangsa Indonesia juga banyak memainkan peranan penting di kalangan minoritas, termasuk perjuangan seorang perwira Tionghoa yang bernama Tan Jin Sing (1760-1831), yang paling banyak “berperan” penting di masa awal-awal berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Carey, 2016: 180-199).

Kita, sebagai warga pribumi asli Indonesia, tak boleh berbangga dulu karena menganggap diri kita adalah pelopor perjuangan bangsa (dan negara) Indonesia. Sekali lagi, jangan berbangga dulu kalau kaum pribumi memang yang paling berjasa dalam perjuangan bangsa (dan negara) Indonesia. Sebab, pada masa-masa awal jelang kemerdekaan bangsa Indonesia, seorang Tionghoa yang bernama Gunawan, pemilik radio *Satriya*, telah “berjasa” meminjamkan mikrofon bikinannya dalam sebuah acara yang amat sangat bersejarah pada Jumat Legi, 17 Agustus 1945 di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta (kini Monumen Proklamasi Kemerdekaan RI) (dikutip dari laman

[https://nasional.kompas.com/read/2018/08/18/09430451/riwayat-mikrofon-](https://nasional.kompas.com/read/2018/08/18/09430451/riwayat-mikrofon-proklamasi?page=all)

[proklamasi?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/08/18/09430451/riwayat-mikrofon-proklamasi?page=all) serta diakses pada 24 September 2018 pukul 16.07 WIB).

Hingga kini, mikrofon bersejarah itu tak ada lagi kabarnya. Sekarang, kondisinya (mungkin) rusak, hilang (raib) ataupun hancur berkeping-keping. Padahal, mikrofon buatan (dan milik) Gunawan itulah yang mengantarkan perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang ditunggu-tunggu sejak ratusan abad lamanya. Mikrofon bikinannya mungkin juga tak akan pernah dilupakan, meski hanya digunakan untuk memberikan bukti akan eksistensi bahwa sebuah negara (dan bangsa) baru telah lahir. (dikutip dari laman

[https://nasional.kompas.com/read/2018/08/18/09430451/riwayat-mikrofon-](https://nasional.kompas.com/read/2018/08/18/09430451/riwayat-mikrofon-proklamasi?page=all)

[proklamasi?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2018/08/18/09430451/riwayat-mikrofon-proklamasi?page=all) serta diakses pada 24 September 2018 pukul 16.10 WIB).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana wacana sosok Soe Hok-gie dalam majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wacana sosok Soe Hok-gie dalam majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penulis berharap hasil dari penelitian ini memberikan bantuan (atau sumbangsih) pengembangan ilmu komunikasi, khususnya di bidang analisis wacana kritis serta isu-isu yang berkaitan tentang rasialisme dan etnisitas di media massa.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi suatu bentuk pemahaman bagi masyarakat mengenai analisis wacana kritis terhadap teks media massa serta pemahaman isu-isu yang berkaitan tentang rasialisme dan etnisitas di media massa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan media massa, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu rasialisme dan etnisitas. Sehingga masyarakat dapat lebih paham bahwa isu-isu rasialisme dan etnisitas harus benar-benar diperhatikan serta tidak boleh dipandang sebelah mata.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Angger Siswanto dan Poppy Febriana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). Penelitian yang berjudul **“Representasi Indonesia dalam *Stand Up Comedy*” (2017)**, di mana penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana representasi bangsa Indonesia dalam lawakan yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono, seorang komedian sekaligus *comedian mic (comic)*. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana kritis pendekatan Norman Fairclough. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pandji dalam lawakannya tentang representasi bangsa Indonesia itu benar-benar sesuai kenyataan, yakni bangsa yang toleran antara satu dengan yang lainnya, meskipun kejadian itu boleh berbanding jauh dengan situasi dan kondisi saat ini. Namun Pandji, sebagai komedian, yang menempatkan posisi politik dalam lawakannya itu agak mengecewakan (karena ia memihak salah satu [calon] pemimpin Indonesia) dan dianggap tak netral di posisi politik.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Kukuh Ashar Utama, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Penelitian yang berjudul **“Analisis Wacana Kritis Stereotip Etnis Tionghoa pada Pertunjukan *Stand Up Comedy* yang Ditampilkan Ernest Prakasa” (2017)**, di mana penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana stereotip etnis Tionghoa dalam lawakan yang disampaikan oleh Ernest Prakasa, seorang komedian atau *comedian mic (comic)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan (*observation*) terhadap siaran televisi *KompasTV* melalui pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian ini juga berfokus pada stereotip etnis Tionghoa yang oleh peneliti dibagi menjadi lima stereotip, yakni stereotip fisik, stereotip sistem sosial, stereotip peran sosial, stereotip budaya dan bahasa, dan stereotip lainnya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lawakan stereotip etnis Tionghoa yang disampaikan oleh Ernest memang bukan untuk menyindir etnisnya, tetapi sebagai bentuk “sindiran” terhadap warga pribumi Indonesia yang

“terlalu” menganggap sebelah mata etnis minoritas di Indonesia, khususnya Tionghoa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fadhillah Sri Meutia, mahasiswi program doktor Ilmu Sosiologi Universitas Indonesia. Penelitian yang berjudul **“Membaca “Tinung” dalam Film Ca-Bau-Kan” (2016)** ini berfokus pada sosok Tinung dalam film *Ca-Bau-Kan* (Nia Dinata, 2002) yang diperankan oleh Lola Amaria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis pendekatan Sara Mills (yang identik dengan isu-isu gender dan feminisme). Penelitian ini juga berfokus pada sosok Tinung sebagai perempuan yang melawan ketidakadilan terhadap dominasi yang dilakukan oleh kaum lelaki pada masa itu. Fokus penelitian ini terpusat pada isu kesetaraan gender dan feminisme, sebab menggunakan metode pendekatan Sara Mills. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Ca-Bau-Kan* merupakan film (*media*) yang ingin menunjukkan posisi lelaki dan perempuan itu sama dan setara serta tak ada yang membedakan (antara posisi lelaki maupun perempuan—menurut versi Sara Mills, sebagai feminis dan aktivis isu-isu gender). Meskipun juga menggunakan (analisis wacana kritis) pendekatan konstruksi Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, namun tetap saja (analisis wacana kritis) pendekatan Sara Mills lebih menonjol dalam penelitian ini.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Arif Bulan dan Kasman, mahasiswa STKIP Yapis Dompu dan STISIP Mbojo Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang berjudul **“Analisis Wacana Kritis pada Pidato Ahok di Kepulauan Seribu” (2018)** ini berfokus pada pidato kontroversial yang

diucapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok), gubernur petahana (*incumbent*) Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada September 2016 lalu yang sempat menghebohkan Indonesia dan internasional sepanjang 2016-2017 hingga berujung pada aksi demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 (atau “Aksi 411”), 2 Desember 2016 (atau “Aksi 212”), serta 11 dan 21 Februari 2017 (atau “Aksi 112” dan “Aksi 212”). Metode penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis melalui potongan (*cropping video*) pidato kontroversial Ahok di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, September 2016 lalu. Penelitian ini juga mengaitkan posisi situasional dan kondisional di mana Ahok sebagai representasi etnis minoritas (Tionghoa) dan orang non-Muslim kedua yang menjadi pemimpin DKI Jakarta setelah Henk Ngantung (1964-1965). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa posisi pemilihan dan pemilahan kata-kata yang diucapkan Ahok saat menyampaikan pidato kontroversialnya itu menjadi saling berlawanan dan berlainan, sehingga menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran pada 4 November dan 2 Desember 2016 serta 11 dan 21 Februari 2017 lalu.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Detya Wulansari, Nunik Karina Widiastuti, dan Reka Yuda Mahardika, mahasiswa Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia IKIP (Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Siliwangi. Penelitian yang berjudul **“Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Kebangkitan PKI pada Artikel-artikel di Media Daring (Online) “Seword.Com””** (2018) ini berfokus pada isu-isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam artikel-artikel yang diulas di media daring (*online*)

Seward.Com, situs milik salah satu pendukung presiden (terpilih) Joko Widodo. Metode penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis pendekatan post-strukturalis dan post-positivisme Roger Fowler. Penelitian ini berfokus pada pemilihan dan pemilahan penggunaan kata serta diksi (sama persis dengan fokus penelitian yang keempat – pen) mengenai isu-isu kebangkitan PKI yang “digoreng” oleh kubu oposisi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui “artikel-artikel” (tanda kutip di sini berarti menunjukkan bahwa artikel itu “dibikin” berdasarkan isu bohong [atau hoaks] dan fitnah terhadap kubu oposisi untuk menjatuhkan martabat dan posisi kubu oposisi pimpinan Prabowo Subianto itu – pen) buatan *Seward.Com*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua kubu (baik koalisi maupun oposisi di Indonesia – pen) saling menjatuhkan dengan menyebarkan berita bohong (hoaks) dan fitnah semenjak Pemilihan Presiden 2014 lalu.

(Catatan: Dalam sistem demokrasi, saling menjatuhkan antar satu dengan lainnya memang diperbolehkan. Namun tidak boleh menggunakan cara yang “kotor” seperti yang dibahas pada penelitian di atas. Ada dua cara untuk saling menjatuhkan dalam sistem demokrasi, yakni kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*) Kampanye negatif memang diperbolehkan, sebab taktik dan strategi itu saling “membuka” kelemahan-kelemahan kedua kubu. Sedangkan kampanye hitam tidak diperbolehkan, sebab dapat menggiring opini publik sehingga menjadikan situasi dan kondisi kedua kubu semakin bersitegang hingga sekarang [Contoh kampanye hitam adalah kasus pemberitaan mantan koordinator kubu pasangan Bo-San atau Bo-No

[pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno], Ratna Sarumpaet, yang mengaku “dianiaya dan dihajar” oleh sekelompok orang tak dikenal di Bandung dan ternyata “sedang menjalani operasi perawatan dan pemulihan wajah di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta”, September 2018-sekarang]).

Dari lima penelitian di atas, yang seluruhnya menggunakan analisis wacana kritis dengan pendekatan yang berbeda-beda, perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah isu minoritas dan rasialisme. Adapun, dua penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian karya Angger Siswanto dan Poppy Febriana yang berjudul **“Representasi Indonesia dalam *Stand Up Comedy*” (2017)** dan penelitian karya Kukuh Ashar Utama yang berjudul **“Analisis Wacana Kritis Stereotip Etnis Tionghoa pada Pertunjukan *Stand Up Comedy* yang Ditampilkan Ernest Prakasa” (2017)**. Keduanya meneliti mengenai sosial dan budaya, khususnya yang berkaitan dengan etnografi, di Indonesia. Yang membedakan dari milik penulis adalah isu yang diangkat. Keduanya mengangkat isu mengenai etnografi (etnis) dan menyinggung sedikit tentang etnisitas dan rasialisme di Indonesia. Dan, penulis justru meneliti isu yang lebih luas dari kedua penelitian yang disebutkan di atas

F. Kerangka Teori

1. Minoritas dan Tionghoa

Etnis minoritas di Indonesia, khususnya etnis Tionghoa, sudah menjadi salah satu bagian dari warga negara Indonesia. Etnis ini dulu

disebut sebagai “Chinese Overseas” alias “Tionghoa Perantauan” sejak dahulu (Suryadinata, 2002: 7-8). Barulah, pada abad ke-20 M, saat masih berada di bawah pemerintah kolonial Belanda, status minoritas sudah dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Bukan lagi warga negara pemerintah kolonial Belanda. Meskipun budaya (dan bahasa) mereka sudah berbeda jauh dengan Tiongkok Daratan (Heryanto, 2015: 198-200).

Artinya, status etnis minoritas, khususnya Tionghoa, hanya mendapat “predikat yang setara” alias “sama rata” dengan status kaum pribumi (Indonesia). Bukan setara dengan kaum kulit putih Eropa. Ini akibat diberlakukannya aturan “kesetaraan” alias *gelijkgeseltde* pada 1854 (Heryanto, 2015: 226).

Apalagi saat memasuki awal-awal abad ke-20, ketika rasa kebangkitan nasionalisme di Indonesia dimulai, setidaknya kaum Tionghoa sudah memiliki rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Bukan lagi merasa menjadi bagian dari Tiongkok Daratan (Suryadinata, 2002: 100). Bagaimanapun juga, minoritas, khususnya etnis Tionghoa, juga memainkan peranan penting selama masa-masa awal penjajahan bangsa Eropa di Indonesia (abad ke-16 M hingga awal abad ke-19 M dan awal abad ke-19 M hingga awal-pertengahan abad ke-20 M).

Leo Suryadinata, dalam *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia* (2002), menulis, jika etnis minoritas, khususnya etnis Tionghoa,

di Indonesia sudah membawa banyak “masalah”, mulai dari segi politik, agama, budaya, dan lain-lain (Suryadinata, 2002: 17-18).

Hal tersebut justru bukan dibantah, melainkan dikuatkan oleh penelitian sejarawan Inggris, Peter B.R. Carey, mengenai Jawa dalam tiga karya fenomenalnya, *Kuasa Ramalan: Perang Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855* (2012); *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro* (2014); dan *Inggris di Jawa, 1811-1816* (2016), saat masa-masa kolonial Belanda, ketika orang Tionghoa enggan diajak bekerja sama untuk memerangi pasukan Mataram Islam (yang mayoritas diisi oleh orang Jawa; dan sisanya berasal dari Madura, Bugis, dan suku-suku di luar Jawa lainnya)—pasca-kepemimpinan Sultan Agung (bertakhta 1613-1645)—di bawah kepemimpinan putra Sultan Agung, Amangkurat I (bertakhta 1646-1678) hingga cicitnya, Pakubuwono II (bertakhta 1726-1749) (Carey, 2012: 280-285; 2014: 170-175; 2016: 180-199).

Akibat adanya “perlawanan” dari kalangan etnis Tionghoa kurun 1730-an hingga 1740-an, Belanda, dengan “tangan dingin”, membantai hampir 10.000 jiwa kaum Tionghoa di Batavia pada 1740-1741 yang memicu terjadinya Perang Jawa I (1741-1743)—dan menjadi cikal-bakal meletusnya Perang Jawa II alias Perang Diponegoro (1825-1830) (Carey, 2012: 280-285; 2014: 170-175; 2016: 180-199).

Dibaginya wilayah Mataram Islam menjadi empat (Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat [dan Keraton Pakualaman] di wilayah barat

serta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Keraton Mangkunegaran) di wilayah timur) adalah akibat “konflik” yang terjadi antara kolonial Belanda dan salah satu “wakil” dari kalangan Tionghoa—yang dipimpin Kapten Tan Jin Sing (1760-1831)—dengan dua suksesor “takhta” Mataram Islam, Pakubuwono III (bertakhta 1749-1788, sebagai “wakil” sah Mataram Islam yang ditunjuk kolonial Belanda) dan Pangeran Mangkubumi alias Hamengkubuwono I (bertakhta 1756-1792, sebagai “wakil” Mataram Islam yang sah atas “petunjuk” leluhur Mataram Islam dan Nyai atau Nyi Roro Kidul alias Ratu Laut Selatan Jawa) yang terjadi akibat “perang sipil” Mataram Islam, yakni Perang Suksesi Jawa (Perang Suksesi Jawa I, 1704-1708; Perang Suksesi Jawa II, 1719-1723; dan Perang Suksesi Jawa III, 1749-1757) (Carey, 2016: 180-199; Hannigan, 2015: 105-111)

Hasil pembagian tersebut antara lain, berasal dari pokok-pokok atau poin-poin dari Perjanjian Giyanti antara Nicolaas Hartingh (Gubernur Wilayah Pantai Utara [Pesisir atau Pasisir] Jawa) beserta dua suksesor “takhta” Mataram Islam, Pakubuwono III (bertakhta 1749-1788, sebagai “wakil” sah Mataram Islam yang ditunjuk kolonial Belanda) dan Pangeran Mangkubumi alias Hamengkubuwono I (bertakhta 1756-1792, sebagai “wakil” Mataram Islam yang sah atas “petunjuk” leluhur Mataram Islam dan Nyai atau Nyi Roro Kidul alias Ratu Laut Selatan Jawa) yang ditandatangani di daerah Giyanti (kini sekitar daerah Colomadu – pen),

Karanganyar, Jawa Tengah, 13-14 Februari 1755 (Carey, 2016: 180-199; Hannigan, 2015: 105-111).

Posisi etnis minoritas, khususnya etnis Tionghoa, selepas merdeka pada 17 Agustus 1945 masih mendapat kepercayaan yang amat tinggi dari Sukarno-Mohammad Hatta. Terbukti, kurun 1945 hingga 1949, beberapa di antara mereka masuk dalam keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP–cikal bakal Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat alias MPR/DPR) dari Kabinet Presidensiil (September-November 1945) hingga kabinet Hatta I-II (Juli-Desember 1949), hingga puncaknya pada insiden pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 18-19 September 1948 (Budiardjo, 2007: 331)

Pasca-1948, posisi dan situasi etnis Tionghoa di Indonesia makin terancam dengan adanya “persekusi” terhadap golongan mereka akibat gerakan berdarah di Madiun tersebut, yang saat itu “diidentikkan” dengan Uni Soviet dan Tiongkok (saat itu Tiongkok belum sepenuhnya merdeka dan masih terjadi “perang sipil” antara pendukung Chiang Kai-Shek, pemimpin revolusioner Tiongkok bersama Dr. Sun Yat Sen, melawan pendukung sosialis-komunis Tiongkok, Mao Tse-tsung alias Mao Zedong, 1947-1949).

Pasca-1948, hingga memasuki awal 1950-an, menjadi era “kebangkitan” kaum minoritas (Tionghoa) di Indonesia, khususnya di bidang hiburan (*entertainment*). Sebut saja Dr. Huyung (ada yang menulis

Eitaro Hinatsu asal Jepang yang datang ke Indonesia sekitar 1930-an; adapula yang menulis Kim Hou-Djung, imigran asal Korea Selatan yang menetap di Amerika Serikat sejak awal-pertengahan abad ke-20 M; dan adapula yang menulis Chen Ho-Young, imigran asal Hangzhou, Tiongkok, awal-pertengahan 1920-an hingga awal-pertengahan 1930-an – pen), seorang sutradara **pribumi** pertama yang menghebohkan jagat hiburan di Indonesia kurun 1950-an (cetak tebal pada kata **pribumi** tersebut merupakan kata penegas bahwa beliau juga merupakan bagian dari warga pribumi sejak diberlakukannya aturan “kesetaraan” pada 1854 – pen). Bersama Usmar Ismail (1921-1971) dan Djamaludin Malik (1917-1970; ayahanda aktris dan penyanyi Camelia Malik – pen), ia menjadi satu dari beberapa perintis perfilman nasional di Indonesia. Padahal, di saat yang bersamaan, PKI juga sedang bangkit dari “kematian” selama hampir dua tahun sejak insiden Madiun 1948 (Heryanto, 2015: 197-242).

Etnis Tionghoa, semasa 1950 hingga 1965, kerap kali dikaitkan dengan Tiongkok karena pengaruh sosialisme-komunisme yang “berkuasa” di masa pemerintahan Sukarno (1945-1965; Demokrasi Terpimpin, 1959-1965) (Heryanto, 2015: 201-204). Terlebih, PKI, yang secara mengejutkan, memenangi Pemilihan Umum 1955, bersama tiga partai lainnya, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Nahdlatul Ulama (NU) (Budiardjo, 2007: 432-433).

2. Teori Wacana

Eriyanto, dalam buku *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (2001), menulis definisi mengenai analisis wacana.

“Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu dan pelbagai pengertian. Meskipun ada gradasi yang besar dari pelbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa” (Eriyanto, 2001: 3-4).

Eriyanto (2001: 4-6) juga membagi tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana, yakni (a) pandangan kaum *positivisme-empiris*. Mereka memandang bahasa sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa adanya kendala atau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Salah satu ciri pandangan ini adalah pemisahan antara realitas dan pemikiran; (b) pandangan yang kedua, disebut sebagai *konstruktivisme*. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme atau positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Dalam pandangan ini, bahasa

tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objek belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral. Bahasa dipahami dalam paradigma ini diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan; dan terakhir (c) pandangan ketiga disebut sebagai *pandangan kritis*. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna.

Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dalam Marianne W Jorgensen dan Louise J Phillips (2007: 46), telah mengembangkan teorinya melalui *dekonstruksi* hal-hal pokok lain dalam teori yang ada. Menurut kedua ahli ini, membaca dengan cermat teori-teori lain bisa menyingkap kontradiksi-kontradiksi internal dan asumsi-asumsi yang tidak bisa disangkal. Dengan cara seperti ini, kandungan ideologis teori-teori yang lain bisa diungkap dan kontradiksi-kontradiksi yang berhasil diidentifikasi bisa ditransformasikan ke dalam piranti-piranti untuk direnungkan lebih lanjut. Metode desktruksionis, bersama dengan gaya tulisannya, membuat Laclau dan Mouffe agak tidak bisa diakses, karena mereka memiliki pra-anggapan tentang pengetahuan yang luas teori-teori yang mereka jadikan sebagai pegangan.

Laclau dan Mouffe mengonstruksi teorinya sendiri dengan jalan menggabungkan dan memodifikasi dua tradisi teoritis utama, yakni Marxisme dan strukturalisme. Marxisme memberikan titik pijakan dalam memikirkan fenomena-fenomena sosial, sedangkan strukturalisme menyediakan makna. Laclau dan Mouffe menyatukan kedua tradisi itu menjadi teori post-strukturalis tunggal. Dalam teori inilah, bidang sosial yang dipahami sebagai suatu jaringan teori untuk menciptakan makna (Jorgensen dan Phillips, 2007: 46).

Laclau dan Mouffe menerima kritik dari post-strukturalis tentang linguistik strukturalis, namun strukturalisme masih bisa digunakan untuk memberikan gagasan impresionatis pesan yang diberikan Laclau dan Mouffe. Penciptaan makna sebagai proses sosial merupakan upaya penetapan makna, *seolah-olah* struktur Saussurean itu ada (Jorgensen dan Phillips, 2007: 47).

Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Phillips (2007: 48) mengutip gambaran impresionatis milik Laclau dan Mouffe,

“Praktik apapun yang berusaha menetapkan hubungan di antara unsur-unsur sehingga identitasnya berubah sebagai akibat praktik artikulatoris kami sebut dengan artikulasi. Totalitas terstruktur yang berasal dari praktik artikulatoris kami sebut dengan wacana. Posisi-posisi yang berbeda seperti yang tampak terartikulasikan

dalam suatu wacana, kami sebut momen. Sebaliknya, kami menyebut unsur untuk mengacu pada perbedaan apapun yang tidak diartikulasikan secara kewacanaan” (Laclau dan Mouffe dalam Jorgensen dan Phillips, 2007: 48).

3. Media Massa

Media massa, terutama media massa cetak, merupakan “perantara” komunikasi paling awal–dan yang paling tua–yang masih dipergunakan hingga sekarang. Media massa merupakan saluran utama komunikasi massa yang menargetkan pesan-pesannya kepada khalayak (komunikan) melalui pelbagai macam saluran (*channel*) seperti, surat kabar (atau koran), majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Saluran komunikasi massa terbagi menjadi tiga: media cetak, media elektronik, dan media baru (*new media*).

Media cetak (*press media*) terdiri atas surat kabar (koran), tabloid, majalah, dan lain-lain. Surat kabar adalah media massa yang paling tua yang pernah tercatat dalam sejarah perkembangan media massa di dunia. Pertama kali ditemukan di masa Romawi Kuno dan dikenal dengan istilah *acta diurna* (catatan-catatan harian; *acta* berasal dari bahasa Latin artinya catatan-catatan; dan *diurna* berasal dari bahasa Latin, artinya harian). Kemudian, pada awal abad ke-17 M, lahirlah periode percetakan Alkitab yang dicetak oleh Johannes Guttenberg asal Jerman–atau yang dikenal

dengan mesin Guttenberg–pada 1609. Cikal bakal percetakan Alkitab inilah yang mengawali masa-masa kelahiran surat kabar. Kemudian menyebar luas hingga ke Humberg (Jerman), Vienna (Wina, Austria), Amsterdam (Belanda), dan Antwerp (Belgia) (Wahyuni, 2014: 47).

Media elektronik (*electronic media*) terdiri dari televisi dan radio, khususnya televisi *streaming* (yang terkoneksi melalui jaringan internet) dan radio *streaming* (yang terkoneksi melalui jaringan internet). Televisi merupakan media massa yang umum–dan sering dijadikan bahan referensi penelitian, baik penelitian sosial, budaya, maupun penelitian-penelitian lainnya–karena sifatnya *audio-visual*, yakni memancarkan suara dan gambar secara bersamaan. Berasal dari bahasa Latin, *tele* (berarti jauh) dan *visi* (berarti penglihatan). Televisi menjadi satu-satunya media yang dikonsumsi paling banyak di dunia dan pengonsumsi televisi terbesar di dunia ialah Amerika Serikat (Wahyuni, 2014: 50). Di AS, siaran televisi menjadi sangat populer karena hampir dikonsumsi oleh (hampir) seluruh kelas sosial masyarakat di sana (Wahyuni, 2014: 50). Berbeda jauh dengan Indonesia yang “hampir” tak semua kelas sosial di Indonesia yang mampu menikmati tayangan televisi. Radio juga merupakan media massa yang paling banyak dikonsumsi oleh seluruh kelas sosial masyarakat di negara-negara maju maupun berkembang karena bersifat luwes, mudah dibawa kemanapun dan mampu bertahan lama hingga perkembangan teknologi (Wahyuni, 2014: 50). Radio memiliki jaringan siaran yang berbeda dengan televisi, yakni dua jaringan utama AM (*amplitude*

modulation) dan FM (*frequency modulation*). Keduanya juga berbeda dalam menyajikan siaran radio. Siaran AM lebih kuat di sinyal yang tak mampu memantulkan jangkauan dari atas, sedangkan FM lebih kuat pada jaringan yang mampu memantulkan jangkauan ke seluruh area (Wahyuni, 2014: 50).

Majalah adalah salah satu jenis dari media cetak, di samping surat kabar dan tabloid (Wahyuni, 2014: 49; Ardianto dan Komala, 2004: 107). Sama seperti surat kabar dan tabloid, majalah juga menjadi sajian utama masyarakat di semua kelas sosial, baik dari kalangan atas maupun bawah. Menurut Dominick, klasifikasi majalah dibagi atas lima kategori utama: (a) *general consument magazine* (majalah konsumen umum); (b) *business publication* (majalah bisnis); (c) *literacy reviews and academic journals* (kritik sastra dan jurnal akademisi); (d) *newsletter* (majalah khusus terbitan berkala); dan (e) *Public Relation Magazine* (majalah hubungan masyarakat) (Ardianto dan Komala, 2004: 107).

Pembagian di atas merupakan klasifikasi kategori umum mengenai majalah secara luas. Sedangkan, klasifikasi kategori yang lebih luas tentang majalah, terutama di Indonesia sendiri, telah dibagi ke dalam jenis-jenisnya. Antara lain, majalah berita (*Tempo*, *Gatra*, dan *Editor*); majalah keluarga (*Ayahbunda* dan *Famili*); majalah wanita (*Kartini*, *Femina*, dan *Sarinah*); majalah pria (*Matra*), majalah anak-anak (*Bobo*, *Ganesha*, dan *Aku Anak Saleh*); majalah remaja perempuan (*KawanKu* dan *Gadis*); majalah remaja lelaki (*Hai*); majalah ilmiah populer (*Prisma*);

majalah umum (*Intisari* dan *Warnasari*); majalah hukum (*Forum Keadilan*); majalah pertanian (*Trubus*); majalah humor (Humor); majalah olahraga (*Sportif* dan *Raket*); serta majalah berbahasa daerah (majalah berbahasa Sunda *Mangle*; dan majalah berbahasa Jawa *Djaka Lodang*) (Ardianto dan Komala, 2004: 112).

Masing-masing majalah memiliki fungsi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Misalnya, majalah *Bola* (olahraga) berisi berita-berita yang berkaitan dengan dunia keolahragaan, seperti sepakbola, basket, tenis, bulutangkis, dan lain-lain. Jadi, majalah ini khusus diperuntukkan di kalangan atlet atau pecinta olahraga. Atau misalnya majalah *Hai* (remaja lelaki) berisi berita-berita mengenai gaya hidup remaja atau anak muda dan berisi tips-tips, baik tips keuangan, penampilan, dan lainnya. Dan, majalah ini khusus diperuntukkan di kalangan remaja lelaki, bukan remaja perempuan (Ardianto dan Komala, 2004: 112).

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani, *methods* adalah cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Budyatna, 2010: 12). Berdasarkan definisi ini, metode adalah suatu cara untuk

mencapai tujuan penelitian dengan mengikuti langkah-langkah yang berkesinambungan dengan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif (Kirk dan Miller dalam Moleong, 2001: 2). Penelitian ini berfokus pada liputan Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016 yang mengangkat Soe Hok-gie, sosok yang dikenal kurun dekade 1960-an sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, dan pecinta alam (pendaki gunung)

2. Objek Penelitian

Media yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah liputan Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016. Liputan dalam majalah ini mengangkat Soe Hok-gie, sosok yang dikenal kurun dekade 1960-an sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, dan pecinta alam (pendaki gunung).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi dan Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati obyek penelitian secara fokus untuk mendapatkan data-data yang kemudian akan diteliti lebih lanjut dan mendalam. Penelitian ini berfokus pada liputan Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016 yang mengangkat Soe Hok-gie, sosok yang dikenal kurun dekade 1960-an sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, dan pecinta alam (pendaki gunung).

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini didapat dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya yang masih berhubungan dan menunjang proses penelitian.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini didapat dari pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yakni liputan Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016. Dalam penelitian ini, beberapa liputan yang berkaitan dengan isu penelitian ini akan diteliti, yakni kutipan wawancara dengan narasumber yang dekat dengan mendiang Soe Hok-gie, kutipan dari buku-buku yang ditulis oleh mendiang Soe Hok-gie hingga kutipan dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang terdekat mendiang Soe Hok-gie.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini adalah data pendukung yang berhubungan dengan objek penelitian seperti situs dalam jaringan (situs *online*), buku (teks atau referensi sejenis), hingga penelitian sebelumnya.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis wacana kritis melalui satu pendekatan, yakni Norman Fairclough (pengembangan teori “dekonstruksi” Jacques Derrida atau yang dikenal dengan istilah *analisis mikro teks*)

Marianne W Jorgensen dan Louise J Phillips, dalam *Analisis Wacana: Teori dan Metode* (2007: 115-121), menjelaskan analisis wacana kritis memiliki lima ciri umum dalam melakukan pendekatan.

Pertama, sifat struktur, proses kultural, dan sosial merupakan sebagian dari linguistik-kewacanaan. Itu artinya, pendekatan analisis wacana kritis harus menggunakan pendekatan teks media (atau intertekstualitas). Bukan hanya mengamati secara objektif maupun subjektif. **Kedua**, wacana itu tersusun dan bersifat konstitutif. Artinya, wacana memiliki konsep dan itu harus “dibentuk” (atau “terbentuk:”) sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Bukan berarti wacana itu berdiri sendiri, melainkan memiliki struktur-struktur dan dasar-dasar yang sesuai dengan intertekstualitas (poin pertama – pen). Sebagaimana dengan poin pertama, poin kedua adalah untuk mengetahui wacana jika dilihat dari sudut pandang subjektif dan objektif.

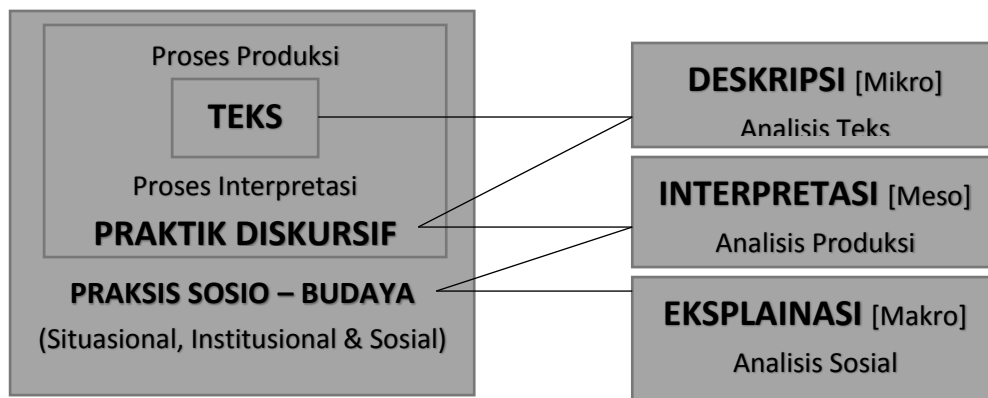
Ketiga, penggunaan bahasa hendaknya dianalisis secara empiris dalam konteks sosialnya. Artinya, penggunaan bahasa (linguistik), khususnya bahasa kiasan, harus sesuai dengan fenomena yang ada. Contoh, istilah “buku merah”, yang seringkali dikiaskan dengan “catatan buruk” atau “meja hijau”, seringkali dikiaskan dengan “pengadilan”. Jadi, penggunaan bahasa (linguistik), khususnya bahasa kiasan, memang harus dikaji dalam pendekatan poin kedua.

Keempat, fungsi wacana sebagai ideologis. Artinya, wacana memang harus bersinggungan dengan ideologi dan hal tersebut dikaji dari sudut pandang (perspektif) sosial-budaya. Ideologi-ideologi dalam wacana kebanyakan tidak terikat satu sama lain, namun adapula yang saling mengikat. Dan, **kelima**, penelitian kritis. Maksud dari ciri-ciri yang terakhir ini adalah penelitian dalam analisis wacana kritis memang dipusatkan pada kajian yang bersifat kritis. Bukan bersifat netral, tetapi harus memihak satu posisi daripada posisi lainnya.

Norman Fairclough, dalam J. Haryatmoko (2016: 1), membagi tiga postulat utama dalam analisis wacana kritis, antara lain (a) ***pendekatan harus berorientasi ke masalah sosial, maka menuntut pendekatan lintas-ilmu***; (b) ***kepihatan utama adalah mendemistifikasikan ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematis data semiotik (tulisan, lisan, atau virtual/nyata)***; dan (c) ***selalu reflektif dalam proses penelitian, artinya mengambil jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi*** (Fairclough dalam Haryatmoko, 2016: 1).

Fairclough, dalam J. Haryatmoko (2016: 23), juga mendeskripsikan tiga dimensi analisis wacana kritis, antara lain (a) ***teks***, yaitu semua yang mengacu ke wicara, tulisan, grafik, dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks

(khasanah kata, gramatika, *syntax*, struktur metafora, dan retorika); **(b) praktik diskursif**, yaitu semua bentuk produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini, ada proses menghubungkan produksi dan konsumsi teks atau sudah ada interpretasi. Fokus diarahkan pada cara pengarang teks mengambil wacana dan *genre* yang ada dengan memerhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan; dan **(c) praksis sosial biasanya tertanam dalam tujuan, jaringan, dan praksis budaya sosial yang luas**. Dalam dimensi ini, sudah mulai masuk pemahaman intertekstual, peristiwa sosial di mana terlihat bahwa teks dibentuk oleh dan membentuk praksis sosial. Model tiga dimensi analisis wacana kritis digambarkan Fairclough seperti di bawah ini (Fairclough dalam Haryatmoko, 2016: 23).



Gambar 1. 1 Skema Model Tiga Dimensi Fairclough

Agar bisa lebih mudah memahami skema di atas, perlu mengikuti penjelasan di bawah ini. Dalam analisis teks, *pertama*, hal mendasar yang perlu dianalisis adalah penggunaan pembendaharaan kata yang terkait dengan makna tertentu dan penggunaan istilah serta metafora karena mau mengacu ke makna

atau tindakan tertentu. Pembendaharaan kata meliputi makna kata: satu kata bisa mempunyai banyak makna, dan makna berbeda tergantung dari konteksnya. Maka, diperlukan kejelian untuk memahaminya. **Kedua**, analisis praktik diskursif mau melihat kekuatan pernyataan dalam arti sejauh mana mendorong tindakan atau kekuasaan afirmatifnya. Dalam dimensi ini, akan dilihat koherensi teks-teks yang sudah masuk ke wilayah interpretasi. Pada tahap ini, intertekstualitas teks sudah mendapat perhatian khusus. Terakhir, **ketiga**, praksis sosial mau menggambarkan bagian aktivitas sosial dalam praksis, misalnya menjalankan profesi (sebagai dokter atau pelayan) selalu menggunakan bahasa khusus, demikian juga sebagai politisi ada kode sosial khusus. Suatu wacana selalu berkelindan dengan pelbagai tingkatannya; dalam situasi langsung, dalam institusi atau organisasi yang lebih luas, dan pada tingkat masyarakat. Istilah ini dikenal dengan *analisis mikro teks* (Haryatmoko, 2016: 22-27; 78).

Setelah melalui tahap-tahap pendekatan analisis wacana kritis di atas yang menggunakan analisis wacana kritis pendekatan Fairclough untuk meneliti liputan Majalah *Tempo* edisi 10-16 Oktober 2016, barulah hasil dari penelitian ini akan menjawab rumusan yang telah dirumuskan di atas.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimulai dari **Bab I** yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian sebagai langkah dasar peneliti melakukan penelitian.

Selanjutnya, **Bab II** berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Awal bab ini dimulai dengan menguraikan sedikit mengenai sejarah Majalah *Tempo* yang kemudian dilengkapi dengan profil majalah tersebut. Lalu, dilanjutkan dengan menjelaskan sosok Soe Hok-gie yang dilengkapi dengan profil dari sosok yang dikenal kurun dekade 1960-an sebagai aktivis-demonstran, sejarawan, dosen, dan pecinta alam (pendaki gunung) tersebut.

Kemudian, **Bab III** berisi pembahasan mengenai objek (Majalah *Tempo*) dan subjek (Soe Hok-gie) yang akan diteliti menggunakan teknik analisis wacana kritis secara detil dan rinci.

Terakhir, **Bab IV** berisi hasil, kesimpulan, serta saran dari penulis terhadap penelitian ini yang selanjutnya dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.